

Praksis Demokrasi yang Rumpang (Kasus Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan)

ABSTRAK

Disertasi ini merupakan sebuah *ijtihad* akademis untuk mengkaji realitas politik dari perspektif teori sosial. Sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah digunakannya metodologi morfogenesis. Metodologi morfogenesis itu dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana aktor (sebagai bagian dari agensi manusia) dapat menentukan segala perubahan yang terjadi di tingkat struktur; meskipun tidak berarti bahwa struktur bisa diubah oleh aktor. Dalam *ijma* yang berkembang di kalangan akademisi, demokrasi dimaknai sebagai penghargaan terhadap hak individu untuk memilih. Masalahnya, pengakuan terhadap hak individu dalam konteks demokrasi lokal bisa bermakna sebagai terbukanya peluang terjadinya politik transaksional, dan hal itu berkaitan dengan adanya gejala banalitas politik. Dalam upaya menafsir fakta sosial yang relevan sebagai tindakan agensial di bidang politik, penelitian ini menggunakan pendekatan realis untuk menjawab pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi ketika perubahan struktur ternyata tidak selalu diikuti dengan perubahan kultural yang mestinya mengerangkai tindakan para-agen; dan mengapa suatu tindakan politik yang secara normatif menyalahi aturan, seperti halnya politik uang, tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat tertentu.

Penelitian ini mengambil kasus Pilkada Langsung Kalimantan Selatan tahun 2005 dan 2010. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kerumpangan kontestasi lebih disebabkan oleh banalitas politik yang diperagakan oleh kelompok elit sebagai agen perubahan. Hal itu berkaitan dengan kesalahkaprahan dalam menafsirkan demokratisasi. Salah kaprahan itu menjadikan transformasi menuju terbentuknya struktur-struktur baru, dan reproduksi nilai-nilai baru, tidak berlangsung dengan baik. Transformasi menuju tatanan yang lebih demokratis, yang diskenariokan dalam bentuk sistem Pilkada Langsung, justru terjebak dalam pencarian dan pengesahan pemenang belaka.

Kata kunci:

Demokrasi, kontestasi politik, kerumpangan politik, banalitas politik, politik uang, politik transaksional.

This dissertation is an academic effort to assess political reality from the perspective of social theory. As a tool of analysis in this study is the methodology used morphogenesis. Morphogenesis methodology was needed to explain how actors (as part of human agency) could determine any changes that occur at the level of the structure; although it does not mean that the structure could be changed by the actor. In a growing consensus among academics, democracy is defined as respect for the individual's right to choose. The problem is, the recognition of individual rights in the context of local democracy to be meaningful as opening up opportunities for transactional politics, and it is related to their symptoms political banality. In an effort to interpret the relevant social facts as agential action in the political field, this study uses the realist approach to answering the question, what actually happens when the structure changes were not always followed by cultural changes that should framed the actions of the agents; and why a normative political action violates the rules, as well as money politics, it is not considered as something that violates the social norms prevailing in a particular society.

This study takes the case of South Kalimantan Direct elections of 2005 and 2010. From the results of this study can be explained that decay of the contestation is caused by political banality that was exhibited by the elite as a change agent. It has to do with misconceptions in interpreting democratization. Misguided it makes the transformation towards the establishment of new structures, and new reproductive values, not going well. Transformation towards a more democratic order, which is scripted in the form of direct election system, it is stuck in the search and validation mere winner.

Keywords:

Democracy, political contestation, political decay, political banality, money politics, transactional politics.